BAB IV

PEMBAHASAN

A. PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL-JIHAD TERHADAP GAGASAN NEGARA ISLAM HTI

HTI sebuah organisasi yang memperjuangkan suatu konsep Khilafah dimana konsep ini menginginkan adanya bentuk negara Islam seperti waktu silam pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa keemasan Turki Utsmani. Peluang kemungkinan berdirinya khilafah tetap ada sekalipun sulit. Karena ide atau apapun yang itu baik atau buruk, salah atau benar, berdasarkan Islam atau non Islam apabila diperjuangkan dengan konsisten, sungguh-sungguh, dan penuh semangat, maka akan mustahil ide tersebut tidak berhasil diwujudkan. Terlebih lagi perjuangan HTI mengatas namakan Islam sebagai pondasi dan ideologi untuk melakukan revolusi, dimana keadaan sekarang perlu kembali pada ajaran Islam demi terciptanya kedamaian.

Menanggapi tentang sepak terjang HTI santri memiliki pandangan mengenai baik buruknya jika konsep khilafah diterapkan di Indonesia. Melihat santri adalah sebuah predikat yang disandang seseorang yang sedang menuntut ilmu untuk memperdalam pengetahuannya tentang masalah keagamaan yang dibimbing langsung oleh seorang ustadz maupun seorang kyai. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan wawancara dengan faby toriqir rama, santri sekaligus mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Ampel mengatakan:

> HTI memiliki argument kuat dalam mengenalkan konsep syarat khilafah Islamiyah, akan tetapi secara umum tetap saja konsep itu tidak bisa diterapkan di indonesia, tapi di sisi lain kepribadian mereka sangat tinggi dalam ketaatan terhadap syariat Islam. Tidak masalah bila kader HTI menjadi pemimpin seperti DPRD maupun presiden dengan perilaku mereka yang memegang teguh syariat Islam tapi bila mereka ingin menerapkan sistem khilafah HTI itu tidak mungkin.[1]

Dari hasil wawancara itu, tidak masalah jika kader HTI ingin masuk keranah politik namun hal ini berlawanan dengan prinsip organisasi HTI yang dilarang untuk ikut campur dalam hal urusan politik suatu negara. Mereka dilarang keras untuk menjadi politisi di negara tempat mereka iungin mendirikan negara Islam atau Khilafah Islamiyah mereka. Dan Kalaupun konsep khilafah Islamiyah terpaksa diterapkan demi kemaslahatan bersama mengapa tidak. Kemudian yang jadi permasalahan apakah umat Islam bisa bersatu padu, karena dilihat dari segi peribadatan saja sudah berbeda madzab dan hal ini sering menjadi perdebatan hingga timbul konflik.

HTI berusaha untuk mengembalikan umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang menurut mereka cemerlang. Dengan berusaha mengembalikan posisi umat seperti masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, dimana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia,

[1] Faby toriqir Rama, Wawancara, Surabaya 30 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan khilafah adalah kepemimpinan umum bagi Muslim untuk merealisasikan syariah secara menyeluruh dan menjaga kemurnian akidah Islam, dan Islam sebagai Ideologinya.

Orang–orang yang berfikiran objektif cenderung bisa menerima dengan jelasnya landasan didirikannya negara Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Serta melihat penerapan syariat secara khaffah agar umat Islam menjadi pribadi yang berakhlakul karimah yang itu orang-orang HTI sudah melakukannya pada tingkah laku mereka sehari-hari. masyarakat indonesia butuh waktu untuk menerapkan syariat Islam karena kebanyakan Islam mereka adalah Islam turunan bukan didapat dari Islam yang mereka cari tahu dan pelajari sendiri, sehingga butuh waktu untuk menerapkannya dan itu harus secara pelan-pelan melalui pendekatan sosial kelapisan masyarakat dari bawah sampai atas. Qoimatul Qisthiyah dalam sesi wawancara mengatakan:

> Mereka (HTI) boleh menerapkan negara Islam akan tetapi tidak merubah ideologi dan UUD 45. Jika mereka ingin mendirikan khilafah Islamiyah cari tempat wilayah lain. dan tantangan yang akan muncul jika konsep khilafah Islamiyah tetap diterapkan di Indonesia adalah tentang landasan negara indonesia yang berlandaskan pancasila dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat.[2]

Jika mereka ingin merubahnya TNI ada digarda depan untuk melawan HTI. Karena tugas TNI adalah menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila. HTI

[2] Qoimatul qisthiyah, Wawancara, 08 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul dengan sebuah gagasan negara Islam (*khilafah*), mereka ingin merubah sistem serta tatanan yang ada dengan sistem yang mereka buat, dan ini sama halnya mereka ingin mengkudeta kepemimpinan birokrasi yang sedang berlangsung.

Menurut Hasbullah Bakry, jika melihat dengan sudut pandang hukum Islam ada lima argumen yang menunjukan bahwa republik indonesia dapat dikatakan negara Islam Non-konstitusional: ***Pertama,*** pancasila "*bisa dianggap ajaran Islam*", dengan mengabaikan dimensi historis dan politis. ***Kedua,*** kitab suci al-Qur'an dan sunnah Rasul Muhammad tidak menyodorkan secara definitif tentang "*negara Islam*", dengan demikian, negara indonesia tak perlu bernama negara Islam. ***Ketiga,*** proporsi (perbandingan) penduduk Muslim yang mayoritas. ***Keempat,*** Republik Indonesia adalah negara duniawi yang anti sekulerisme. ***Kelima,*** fakta empiris bahwa presiden indonesia selalu orang Muslim.[3]

Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana proses dialektika santri dalam memberi pandangan terhadap gagasan negara Islam Hizbut tahrir Indonesia

1. Eksternalisasi santri

Eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik.

[3] Hari Zanbahir dan Robi Nurhadi, *Agama dan Negara analisis kritis pemikiran politik Nurcholis Majid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia. Dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Santri Al-jihad melakukan eksternalisasi untuk menunjukan eksistensinya sebagai seorang santri ketika dipondok, menjadi mahasiswa ketika berada dikampus dan menjadi pekerja ketika mereka berada dikantor maupun dalam LBB (lembaga bimbingan belajar). Dengan pola pikir yang baru mereka dapatkan dari hasil eksternalisasi dipondok, kemudian meyakininya, secara tidak langsung nilai-nilai dan pola pikir yang terkonstruksi kemudian akan terealisasikan dalam bentuk pemikiran santri dalam sebuah sudut pandang dalam menyikapi suatu hal.

Sebab eksternalisasi merupakan sebuah keharusan antropologis. Manusia tidak bisa dibayangkan akan terpisah dari pencurahan nilai dalam dirinya ke alam dunia sekarang ini. Kemudian bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Karena aktifitasnya manusia menspesialisasikan dorongannya dan memberikan stabilitas dalam dirinya. Kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptalah pemikiran yakni sebuah pemikiran dari hasil pencurahan terhadap nilai yang ada disekitarnya. [4]

Sebagai santri yang juga menjadi mahasiswa, santri ponpes mahasiswa Al-jihad memiliki dua tempat pencurahan yakni pondok pesantren dan universitas (kampus). Jika santri yang lebih memilih menjadikan pondok pesantren sebagai tempat dominan untuk mecurahkan diri hal ini bisa dilihat dari corak pemikiran yang religious, dimana pola pemikiran itu didapatkan dari hasil interaksi bersama penghuni pondok. sedangkan untuk santri yang menjadikan universitas (kampus) sebagai pencurahan yang dominan corak pemikiran lebih akademisi yang semua masalah dilihat dari berbagai sudut pandang dari kaca mata ilmu pengetahuan. Universitas memberi warna pemikiran, yang itu tidak didapati pada pondok pesantren. dalam wawancaranya dengan Faby Toriqir Rama menyatakan bahwa:

> Kampus lebih mempengaruhi pandangan saya. di kampus tempat saya menimba ilmu terdapat para dosen pengajar yang memberikan wawasan pengetahuan baik para dosen ini memberikan ilmu secara langsung atau tidak langsung dengan cara memberi tugas kuliyah.Tidak hanya dosen, dikampus saya bebas berinteraksi dengan teman-teman saya baik itu teman dekat maupun teman yang baru dikenal ntah itu cewek maupun cowok.[5]

Dari hasil wawancara diata meskipun pemikirannya lebih condong kekampus santri tetaplah santri, karena santri adalah sekumpulan individu yang menuntut ilmu dalam sebuah lembaga pendidikan yang disebut pesantren, pengajarnya adalah para ustadz

[4] Peter L. Berger, *Langit Suci,agama sebagai realitas sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES,1991), 5.

[5] Faby Toriqir Rama, Wawancara, Surabaya 30 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kyai yang menguasai bidang ilmu keagamaan. Jadi kehidupan santri tidak lepas dari kajian dan kegiatan keagamaan yang sedikit banyaknya menambah wawasan keagamaan mereka, yang suatu saat berguna ketika mereka berada dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan yang bermasyarakat inilah, sebuah pola pikir yang didapat bisa dijalankan atau dipraktekkan, yang pada nantinya akan menjadi konsumsi publik sekitar.

2. Obyektifikasi santri

Objektivikasi yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si pembuat hasil itu sendiri sebagai suatu fakta yang berada di luar pemahaman dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Dari berbagai pencurahan yang dilakukan oleh para santri pondok pesantren Al-jihad meliputi gagasan cara berpikir, ide-ide, dan kebiasaan yang menjadi pedoman, tetapi menjadi sebuah pendorong kelakuan dan pandangan hidup santri, karena nilai sistem budaya merupakan konsep yang hidup dalam alam pikiran manusia. Dan kemudian bisa melembaga dalam kegiatan masyarakat secara umum.

Obyektivitas para santri mencakup semua unsur pembentuknya. Lembaga-lembaga, peran-peran, dan identitas-identitas itu ada sebagai fenomena-fenomena nyata secara obyektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dunia sosial, meskipun semua itu tidak lain adalah produksi-produksi manusia. Pondok pesantren sebagai pelembagaan keilmuan manusia dalam suatu tatanan masyarakat tertentu dialami dan difahami sebagai kenyataan yang obyektif. Hasil eksternalisasi (*obyektivikasi*) terdapat pada peran-peran yang diharapkan dimainkan oleh santri dalam konteks kelembagaan yang bersangkutan, sekalipun ternyata santri tidak menyukai apa yang dilakukannya. Dengan memainkan peran-peran ini, santri kemudian mewakili kelembagaan pondok pesantren dengan cara yang bisa dimengerti oleh dirinya sendiri maupun orang lain. dalam sesi wawancaranya dengan Masrurotul Fadlilah didapati data bahwa:"Pondok, lebih sering dipondok dari pada dikampus, jadi otomatis pemikiran saya lebih condong dipondok".[6]

Dalam wujud nyata santri Al-jihad mempraktikan apa yang mereka dapatkan dari pondok berupa pemikiran keagamaan dan bagaimana cara mereka menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agama. Transformasi pemikiran rasionalis kearah agamis membuat santri lebih fokus menjadikan agama sebagai tolak ukur mereka dalam menerima maupun menolak pemikiran yang ditawarkan oleh organisasi maupun gerakan keagamaan. Santri yang baru mondok atau nyantren pola pikir mereka sedikit berbeda dari pada mereka yang sudah dari kecil sudah mengenyam pendidikan pondok pesantren. Hal

[6] Masrurotul Fadlilah, Wawancara, Surabaya 05 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat dilihat dari sikap mereka yang dari kecil mondok, sikap mereka lebih toleran, setidaknya tahu paham yang benar dan paham salah sehingga lebih santai dan tidak kaku menyikapi permasalahan agama. Sedangkan yang baru mondok mereka sangat sensitif karena mereka ingin dilihat sebagai santri yang pengetahuan agamanya lebih luas dan Ketika terjadi permasalahan agama mereka secara tegas menyuarakan pendapat mereka baik itu setuju maupun tidak. Akan tetapi ada juga santri yang baru mondok yang menyikapi permasalahan agama dengan sikap acuh tak acuh karena merasa ilmu agama mereka lebih rendah dari yang lain.

Hasil dari ekternalisasi itu kemudian muncul berbagai pemahaman baru yang sebelumnya tidak diketahui dan dipahami oleh para santri pondok pesantren Al-jihad, dalam hal ini adalah pemahaman tentang gagasan negara Islam HTI. Dalam menyikapi gagasan negara Islam HTI, pengaruh yang didapat dari pondok maupun universitas (kampus) memiliki andil besar untuk santri mengeluarkan pandangannya mengenai hal tersebut.

3. Internalisasi santri

Internalisasi, Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran.[7]

Proses internalisasi harus selalu dipahami sebagai salah satu momentum dari proses dialektik yang lebih besar dan juga termasuk momentum-momentum eksternalisasi dan obyektivikasi. Santri al-jihad tidak diciptakan sebagai suatu benda yang pasif dan diam. Sebaliknya, dia dibentuk selama suatu dialog yang lama yang dalam prosesnya mereka sebagai seorang peserta. Yaitu, dunia sosial (dengan lembaga-lembaga, peran-perannya, dan identitas-identitasnya) tidak secara pasif diserap oleh santri, tetapi secara aktif diserap kembali dalam dirinya. Lebih jauh, begitu santri dibentuk sebagai suatu pribadi, dengan suatu identitas yang bisa dikenal secara subyektif dan obyektif. Santri terus berpartisipasi dalam dialog yang mempertahankannya sebagai suatu pribadi dalam kelangsungan hidup di pondok pesantren.Berawal dari beberapa ide dan pandangan yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Al-jihad membuat para santri secara individu memandang bahwa gagasan negara Islam HTI tidak bisa diterapkan di Indonesia dengan alasan bahwa para pejuang yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan indonesia bukan orang yang beragama Islam saja, melainkan dari agama lain pun ada.

[7] Peter L. Berger, *Langit Suci,agama sebagai realitas sosial,* terj. Hartono (Jakarta: LP3ES,1991), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hal ini tetap dipaksakan ditakutkan dapat menimbulkan protes, kecaman, dan kerusuhan dari pihak Nonmuslim, dan yang ditakutkan adalah seperti beberapa pulau yang penghuni nonmuslim menjadi mayoritas menginginkan merdeka dan berdiri sendiri dari negara kesatuan republik indonesia.

B. NEGARA ISLAM VERSI SANTRI

Dalam buku *Tradisi Pesantren studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan* karya Zamakhsyari Dhofier dijelaskan bahwa Penjelasan mengenai kata pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an*, yang berarti tempat tinggal para santri.[8] Terlepas dari pengertian kata tersebut yang jelas ciri umum dari pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli indonesia, yang terus berkembang dari dulu sampai sekarang. Bahkan pada zaman sekarang, pesantren menjadi salah satu penyangga yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dari bangsa indonesia.

Tentu saja tidak semua pesantren telah mengalami perubahan yang sama. Dalam tradisi pesantren, kini telah terdapat pemisahan antara pesantren-pesantren yang mengajarkan pengetahuan umum dan yang masih fokus masalah kajian keagamaan. Walaupun pemisahan ini belum menimbulkan pengelompokan atas dasar sosial keagamaan yang berbeda dan masih sama-sama terikat sebagai penganut *Ahlusunnah Wal*

[8] Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan*, (Jakarta: LP3ES, edisi revisi, 2015), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jama'ah, namun pemisahan tersebut telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam beberapa hal seperti bentuk aktivitas sosial dan intelektual, cara berpakaian, gaya hidup, tingkah laku kemasyarakatan, dan aspirasi pekerjaan.

Berbicara mengenai negara Islam santri al-Jihad mempunyai sebuah gagasan sendiri tentang negara Islam Indonesia yang mereka dambakan suatu saat bisa terwujud. Berikut penjelasannya:

1. Dasar Hukum Berdirinya

Tujuan Diciptakannya manusia di bumi untuk menjadi khalifah, dan penetapan hukum-hukum yang digunakan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan ajaran sang khalik tentang kesejahteraan umat manusia. Ketika berbicara mengenai dasar dari didirikannya negara Islam mungkin tidak akan lepas dari; *Tauhid* (ke Esaan Allah) dan *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan dalam Islam). Ukhuwah Islamiyah menegaskan bahwa umat manusia yang terdiri dari berbagai unsur bangsa haruslah bersatu dengan berkenalan satu sama lain, dan mereka semua mempunyai derajat yang sama dalam kedudukan sosialnya. Kalaupun ada perbedaan sosial itu adalah karena perbedaan kemampuan bertakwa saja. Maka, atas dasar inilah Islam membangun daulah atau negara sebagai wadah melakukan keberlangsungan hidup didunia. Begitu juga dalam wawancaranya Faby Toriqir Rama menyatakan bahwa, "Dasar hukum untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikannya Tidak wajib bahkan sunnah pun tidak. sebab nabi tidak menyebut dalam hadist dan di didalam alqur'an juga tidak terdapat penjelasan mengenai harus didirikannya negara Islam."[9]

Hal itu menunjukan bahwasanya dasar hukum yang digunakan untuk mendirikan sebuah negara Khilafah memang tidaklah ada, begitu pula anjuran untuk menidirkannya pun tidak ada. Tapi jika memang negara Islam ingin didirikan, haruslah melihat konteks dalam penerapan negara Islam itu sendiri, sehingga tidak merusak tatanan sistem yang ada. dan dilihat dari urgensitas keadaan sosial politik yang ada pada negara itu sendiri. Sederhananya Negara Islam boleh saja didirikan bila suatu negara dalam keadaan darurat, dan menjadi sunnah bila dalam mendirikannya mempunyai banyak manfaat.

2. Tujuan Pendiriannya

Sementara itu, dibentuknya suatu negara adalah untuk menaungi warga negaranya, layaknya rumah yang memberi perlindungan dari panas terik matahari ketika pagi dan pada musim panas, dingin ketika musim hujan, dan memberi kenyamanan bagi penghuni rumah tersebut. Dalam kesempatan lain disampaikan saat wawancaranya yaitu, Qoimatul Qistiyah:

Negara Islam mempunyai tujuan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yang mana negara memberi kesejahteraan bagi rakyatnya dimana kata Islam dan

[9] Faby Torriqir Rama, Wawancara, Surabaya, 30 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pluralisme dijunjung tinggi. Rakyatnya menghargai perbedaan antar sesama dan bukan Islam yang sedikit banyak menghina kelompok lain karena berbeda pendapat dalam hal peribadatan, rasa menghargai perbedaan inilah yang membuat terciptanya masyarakat madani dan negara yang tentram.[10]

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa gagasan mendirikan Negara islam itu adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya. Dan menjadikan hukum islam sebagai dasar bernegara, sekaligus pluralisme menjadi hal yang sangat penting juga untuk di utamakan mengingat negara indonesia yang memiliki kultur dan budaya yang beragam. Kalau memang manusia adalah putera-putri dari seorang pria dan wanita, maka kesatuan asal mereka itu mengharuskan adanya persamaan hak dan kewajiban serta persamaan dan tanggung jawab. Semua kaum Muslimin, sekalipun berbeda warna dan kebudayaan mereka; berbeda suku dan negeri mereka, namun semua mereka sama didepan Islam. Hak dan kewajiban agama mereka sama; mereka sama dalam pandangan negara dan mereka sama didepan pengadilan. Adapun persamaan hak, kewajiban dan tanggung jawab berarti tidak boleh ada perbedaan antara manusia karena turunan darah, harta kekayaan dan pangkat kemegahan. Islam juga menyamakan kedudukan kaum Muslimin dengan kedudukan kaum *"dzimmi"*, yaitu orang-orang kafir yang berlindung dibawah kekuasaan negara Islam. Dalam kehidupan sosial dan politik, kecuali dalam hal-hal tertentu yang oleh ajaran Islam telah menetapkan kedudukan khusus bagi kaum Muslimin dalam bidang

[10] Qoimatul Qisthiyah, Wawancara, Surabaya, 08 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan dalam bidang akidah dan ibadat tidak boleh ada persamaan sama sekali, juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini, Islam telah menarik garis nyata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir.

Mengutip pendapat Abdul Kadir Audah dalam buku *"Di Mana Letaknya Negara Islam"* karya A. Hasjmy, tentang adanya "persamaan" antara kaum Muslimin dengan kaum dzimmi, sebagai berikut:

> tidak ada perbedaan antara orang-orang dzimmi dengan orang Islam, kecuali dalam soal-soal yang berhubungan dengan akidah. Karena itu, tiap-tiap hal yang bertautan dengan akidah, dalam hal tersebut tidak ada persamaan; karena itu persamaan yaitu menempatkan kaum dzimmi pada tempat yang sesuai dengan akidah mereka, dan mendudukan kaum dzimmi pada kedudukan yang sesuai dengan kepercayaan mereka.[11]

Jadi tujuan negara Islam adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dengan landasan saling menghargai perbedaan dan menjaga ukhuwah Islamiyah, sehingga mereka menjadi satu kekuatan yang kokoh seperti bangunan. Menjadikan perbedaan sebagai rahmat antar umat beraga, baik Muslim maupun Non-Muslim. Sehingga dapat mengurangi konflik dan memperbanyak kedamaian antar sesama warga negara.

[11] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam,* (Surabaya:PT Bina Ilmu, cet 1, 1984), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk Pemerintahan

Dalam kesempatan wawancara dengan Muhammad Hanan Tantowi santri Pondok pesantren Al-jihad menjelaskan bahwa,

> negara Islam adalah Negara yang menggunakan Sistem pemerintahan Demokrasi Islam seperti halnya yang dipraktikkan pada masa-masa awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Khulafa al-Rasyidin adalah suatu bentuk pemerintahan yang ideal sehingga cocok untuk diterapkan kembali jika dibentuk suatu negara Islam.[12]

Penjelasan itu menunjukan bahwa sistem yang dulu digunakan pada masa Nabi dan para sahabat sangatlah mirip dengan sistem Demokrasi, meskipun sistem demokrasi saat ini pastilah juga memiliki kelemahan atau tidak sesempurna pada masa nabi dan sahabat. Namun yang perlu kita lihat dan kita pahami bahwa masa Kepemimpinan Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah saat itu juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki kultur dan budaya yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lainnya seperti halnya di Indonesia.

Bentuk pemerintahan yang demokratis dimana semua rakyat memberikan aspirasinya pada pemerintah tanpa memandang kelas, ras, dan suku menjadi bentuk pemerintahan yang diinginkan santri jika negara Islam didirikan. Akan tetapi demokrasi secara Islam yang menjadikan Islam sebagai landasannya. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak didepan hukum.

[12] Muhammad Hanan Tantowi, Wawancara, Surabaya, 30 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini kemudian muncul ungkapan-ungkapan untuk demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia). Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar bagi semua orang Muslim, baik sebagai individu, agggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimanapun dan kapan saja , supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Konsep pokok yang merupakan dasar dari gagasan demokrasi dalam Islam adalah musyawarah. Konsep ini berdasarkan pada perintah Al-Quran dalam surat Ali Imran;159 dan surat As-Syuura;38, kedua ayat tersebut berisi perintah untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah yang ketentuan pemecahan masalah itu sendiri tidak dijelaaskan dalam Al-Qur'an. Al-Quran surat Ali-Imran ayat; 159, memerintahkan musyawarah dalam kaitan dengan "peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Berdasarkan konteks sehingga memiliki nilai yang sangat tinggi bagi umat Islam. Berdasarkan konteks historis ayat tersebut yang turun berkenaan dengan permusyawaratan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Muslimin Madinah pada saat menghadapi perang uhud. Ayat ini berhubungan dengan surat Asy-Syura ayat; 38 yang secara umum memerintahkan seluruh umat Islam untuk melakukan musyawarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memutuskansuatu urusan dengan berdasarkan kepatuhan pada hukum Allah.[13]

Maka dari itu, Pemerintahan Islam berbeda dengan pemerintahan yang ada, Hal ini dapat dilihat dari corak Pemerintahannya. Tidaklah serupa dengan pemerintahan Otokrasi (pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang) dan tidak serupa pula dengan pemerintahan konstitusi, karena pemerintahan konstitusi tunduk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan buatan manusia. Dilihat dari fungsinya, pemerintahan Islam mempunyai fungsi untuk menegakkan perintah Allah, atau dangan kata lain menegakkan Islam itu sendiri. dimana Al-Qur'an telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam, mendirikan sembahyang dan mengambil zakat, menyuruh makruf dan melarang yang mungkar mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas –batas hukum Allah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa negara Islam versi santri adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan *Demokrasi Islam,* sistem yang menggunakan musyawarah sebagai pokok dasarnya. Jadi pemerintahan harus dibentuk dan diselengarakan secara musyawarah dengan rakyat. Struktur negara haruslah sesemikian rupa sehingga rakyat bebas

[13]Aidul Fitriciada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan pendapat mereka. Dari ayat Al-Qur'an Qs Ali-Imran ayat: 159 dan Qs As-Syura dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kasih sayang dan simpati. Santri ingin pemerintah dapat meringankan beban rakyat dan memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan pokok mereka sekaligus kenyamanan. Pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan, kehidupan yang lebih layak dan memberikan kemakmuran bagi mereka, dan jangan sebaliknya pemerintah sibuk dengan bagaimana mensejahterakan dirinya dan keluarga tanpa memperhatikan rakyat yang seharusnya mereka ayomi dan jaga.

Al-Maududi menganggap bahwa manusia harus membaktikan dirinya kepada Allah dengan berpegang pada perintah-perinthnya dalam setiap aspek kehidupan. Karena Perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an berisi perinsip-prinsip etika, sosial, politik, dan ekonomi, pidana dan lain sebagainya.[14] Tidak hanya al-Maududi Hasan al-Banna ingin merealisasikan cita-cita hukum Islam dengan formal atau konstitusional. al-Banna mengatakan bahwa negara Islam adalah tempat bergantung individu dan kelompok atau keluarga, perorangan dan masyarakat, pada persoalan-persoalan yang prinsip maupun perinciannya. Negara Islam merupakan suatu wadah interaksi yang positif antar warganya. Ia juga harus mampu

[14] Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI perspektif kritis,* (Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan yang mendesak berupa keamanan dan ketertiban masyarakat serta persoalan ekonomi dan pembangunan.

Negara menurut al-Khomeini adalah instrument bagi pelaksanaan undang-undang tuhan dimuka bumi. Tidak seperti dalam negara demokrasi (murni), pada dasarnya tidak ada hak negara seperti lembaga legislatif sebagai wakil rakyat (*demos*) untuk membuat undang-undang. Otoritas membuat undang-undang dan kedaulatan ada ditangan Allah., yang paling mengetahui dan berhak menafsirkan hukum-hukum tuhan adalah kelompok elite ahli (wali atau penguasa). Seluruh bagian struktur politik negara mestilah di bawahkan kepada wali ini. Pemikiran ini bertolak belakang dari pemikiran santri bahwa dalam negara rakyat dan penguasa (pemerintah) bermusyawarah untuk kebaikan bersama dalam menentukan arah suatu negara. Karena dunia selalu berkembang begitu juga dengan pemerintahan suatu negara, terutama indonesia. Seperti halnya UUD yang diamandemen untuk penyempurnaan beberapa aturan dasar yang berkaitan dengan tatanan negara dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama, memperkuat negara, jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi rakyat dalam pemerintahan, menjalankan negara secara demokratis, perlindungan HAM, dan yang terakhir untuk menyempurnakan aturan dasar tentang kehidupan bernegara dan juga berbangsa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara.

Dalam penerapan negara Ali Abd Raziq berpendapat Agama Islam tidak meletakkan bentuk pemerintahan tertentu (*kekhalifahan*), tetapi Agama Islam memberi kebebasan mutlaq untuk menjalankan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang dimiliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Ali Abd. Raziq ingin menyatakan Islam itu tidak kaku dalam menyikapi tatanan kehidupan kemasyarakatan atau bernegara. Pendapat ini serupa dengan apa yang diutarakan santri, bahwa dalam penerapan negara Islam haruslah memperhatikan keadaan sosial politik yang ada dinegara itu sendiri. contohnya saja di Indonesia, jika negara Islam tetap dipaksakan diterapkan dengan alasan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ditakutkannya timbul konflik antar warga negara lebih rasisnya bisa disebut dengan perang antar Agama. Masrurotul Fadlilah menjelaskan dalam wawancaranya:

> untuk negara Indonesia sudah cukup Bagus, dan tidak usah dirubah. Untuk penerapan negara Islam di Indonesia dari 100% warganya mungkin yang setuju 70%. karena memang mayoritas Islam tapi terdapat nonmuslim jika dipaksakan takutnya terjadi konflik dan itu jauh dari apa yang dicita-citakan Islam yakni sebagai agama yang rahmatan lil alamin.[15]

Hal itu menunjukan bahwa indonesia yang saat ini sudah memiliki sistem kenegaran yang menjadikan pancasila sebagai

[15] Masrurotul Fadlilah, Wawancara, Surabaya, 05 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan bernegara di indonesia, sekaligus menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintaha sudahlah sangat bagus, namun apa bila sistem yang ada sekarang ini jika ditambah lagi dengan hukum syariat islam maka indonesia akan menjadi negara yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id